Global Political Studies Journal
Volume 10 Nomor 1 Edisi April 2026
P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905
DOI 10.34010/gpsjournal.v10i1

Pembangunan Kekuatan Maritim Indonesia Era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

Angga Nurdin Rachmat
[1]Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Jenderal Achmad Yani
Jl. Terusan Jenderal Sudirman PO.BOX 148, Kota Cimahi, Indonesia

e-mail: angga.nurdin@lecture.unjani.ac.id

Abstract

The objective of this research is to provide an analysis of the policies and future of the development of Indonesian maritime power and defense during the era of President Prabowo Subianto. The research use a qualitative method with data obtained from literature studies of various official government documents, previous research and electronic media articles. This study emphasize on three important points: first, the projection of the development of Indonesian naval power carried out through the acquisition of defense equipment from various countries; second, the development of naval power also has significance for strengthening Indonesian diplomacy and foreign policy; and finally, the challenges that must be faced by the government of President Prabowo Subianto in efforts to develop maritime power. This study uncovers the development of Indonesian maritime power wich directed to the efforts by strengthen the Indonesian Navy as a green-water navy as a basis for supporting diplomacy and the free and active foreign policy adopted by Indonesia. In addition, this study also identified that in developing its maritime power, the Indonesian government under the leadership of President Prabowo Subianto will face various challenges from both political, economic and also technical aspect.

Keywords— *Diplomacy, Indonesian Navy, Indonesia, Maritime Power*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis terhadap kebijakan serta masa depan pembangunan kekuatan dan pertahanan laut Indonesia pada era Presiden Prabowo Subianto. Metode penelitian yang digunakan dalam adalah metode kualitatif dengan data yang diperoleh dari studi litelatur terhadap berbagai dokumen resmi pemerintah, penelitian terdahulu maupun artikel media elektronik. Penelitian ini membahas tiga poin penting yakni pertama, proyeksi pembangunan kekuatan angkatan laut Indonesia yang dilakukan melalui akuisisi ALUTSISTA yang berasal dari berbagai negara; kedua, pembangunan kekuatan angkatan laut juga memiliki signifikansi terhadap penguatan diplomasi dan politik luar negeri Indonesia dan terakhir, tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pembangunan kekuatan maritim. Penelitian ini menemukan bahwa pengembangan kekuatan maritim Indonesia diarahkan pada upaya penguatan TNI AL sebagai *green-waters navy* sebagai dasar untuk mendukung diplomasi serta politik luar negeri bebas aktif yang dianut oleh Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa dalam pembangunan kekuatan maritimnya, pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan menghadapi berbagai tantangan baik dari sisi politik, ekonomi maupun teknis.

Kata kunci— Diplomasi, Indonesia, Kekuatan Maritim, TNI AL

1. Pendahuluan

Pertahanan maritim Indonesia mulai memperoleh perhatian pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode pertama tahun 2014-2019 dengan mengemukakan gagasan Poros Maritim Dunia (PMD). PMD sendiri

Global Political Studies Journal
Volume 10 Nomor 1 Edisi April 2026
P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905
DOI 10.34010/gpsjournal.v10i1

memiliki 3 makna yakni *pertama* visi membangun Indonesia untuk kembali pada jati diri bangsa dan negara maritim sekaligus membangun kekuatan maritim bagi Indonesia yang bersatu, sejahtera dan berwibawa; *kedua,* dapat dimaknai sebagai doktrin yang merupakan acuan dalam pecanpaian tujuan bersama dan; *ketiga*, upaya untuk membangun kejayaan politik, ekonomi dan keamanan (Efriza, 2018). Meskipun demikian, pada era pemerintahan Presiden Jokowi belum terlihat keseriusan dalam upaya meningkatkan kekuatan pertahanan maritim secara signifikan. Terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia membawa harapan baru dalam rangka pembangunan kekuatan pertahanan. Dimana saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua tahun 2019-2024, telah meletakan gagasan pembangunan pertahanan yang kuat dalam rangka meningkatkan kewibawaan Indonesia di mata internasional. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai negara maritim, modernisasi kekuatan maritim Indonesia masih tertinggal dibelakang negara-negara lain (Chairil et al., 2022).

Berbagai literatur telah menyoroti tema mengenai upaya dan pentingnya pertahanan laut dan pembangunan kekuatan angkatan laut Indonesia. Supandi (Supandi, 2015) memberikan uraian mengenai pembangunan angkatan laut dalam rangka mendukung PMD di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Disisi lain peran penting TNI AL dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah Indonesia diangkat oleh Budiman et.al (Budiman et al., 2023) dengan melihat pada sisi upaya penguatan *Maritime Domain Awarness* (MDA), sementara Hermawan dan Sutanto (Hermawan & Sutanto, 2022) menyoroti strategi pertahanan laut Indonesia dihadapkan pada ancaman dan kekuatan laut sedangkan Wira et. al (Kusuma & Faisal, 2022) menghadapkan strategi pertahanan laut Indonesia pada dinamika maritim di tingkat global dan regional. Adapun artikel yang menyoroti modernisasi angkatan laut secara umum dalam tulisan Setiawati et.al (Setiawati et al., 2025) dan dari aspek organisasi pada tulisan Bawono (Bawono, 2026). Keoni et. al (Marzuki et al., 2025) secara spesifik menyoroti mengenai masa depan modernisasi angkatan laut setelah era Jokowi. Berdasarkan pemaparan berbagai literatur diatas, belum ditemukan penelitian yang mencoba untuk menjelaskan arah, tujuan serta agenda yang diusung dalam kebijakan pembangunan kekuatan maritim khususnya terkait modernisasi TNI AL pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dikaitkan dengan politik luar negeri dan diplomasi.

Berdasarkan latar belakang serta belum adanya tulisan yang mencoba melihat bagaimana kebijakan maupun arah pembangunan kekuatan dan pertahanan laut Indonesia di Era Prabowo Subianto, maka tulisan dalam artikel ini berusaha untuk menjawab pertanyaan bagaimana arah pembangunan pertahanan maritim Indonesia di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto?. Berdasarkan pertanyaan tersebut penulis mengemukakan argumen bahwa pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pembangunan pertahanan maritim telah menunjukan komitmen serius untuk mengarah pada pembangunan *green-waters navy* melalui akuisisi berbagai Alat Utama Sistem Persenjataan (ALUTSISTA) yang akan memiliki signifikansi terhadap diplomasi Indonesia namun disisi lain komitmen ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan secara politis, ekonomi maupun operasional. Tujuan utama dari artikel ini adalah mencoba membangun analisis mengenai arah, tujuan serta agenda

Global Political Studies Journal
Volume 10 Nomor 1 Edisi April 2026
P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905
DOI 10.34010/gpsjournal.v10i1

dalam kebijakan pembangunan kekuatan maritim yang terkait dengan politik luar negeri serta diplomasi Indonesia pada masa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam 5 tahun yang akan datang. Disamping itu artikel ini akan membahas tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kekuatan maritim Indonesia.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Istilah kekuatan maritim yang digunakan dalam tulisan ini dapat dirunut pada konsep kekuatan laut (*sea power*) yang dikemukakan oleh A.T Mahan. Mahan menjelaskan bahwa *sea power* adalah kemampuan sebuah negara mengelola wilayah laut untuk kepentingan nasionalnya (Anwar, 2016). Disisi lain Teo (Teo, 1991) penjelasan dari kekuatan maritim merupakan gabungan dari kemampuan sebuah negara untuk menggunakan wilayah laut dalam rangka memenuhi tujuan ekonomi, keamanan dan lainnya. Bateman (Bateman, 1996) melihat bahwa kekuatan maritim memberikan penekanan terhadap pentingnya pertahanan laut yang menjadi dasar diantara keamanan maritim, kepentingan maritim dan industri berbasis kelautan serta kontribusi dari kemampuan laut, udara dan darat untuk melakukan operasi maritim.

Kearsley (Kearsley, 1992) memberikan model indikator input-output untuk mengukur kekuatan maritim sebuah negara. Input dari model tersebut meliputi aspek fisik (letak geografis, wilayah maritim, rasio laut dan darat serta kekayaan laut), ekonomi (GDP/km^2 wilayah maritim, persentase GDP dari industry, GDP per kapita, armada pelayaran, galangan kapal, penggunaan pelabuhan, populasi) dan politik (budaya maritim, tipe pemerintahan dan pola pengelompokan/blok). Sementara output dari model ini diantaranya adalah tercermin dari diplomasi maritim, pengelolaan wilayah, kehadiran angkatan laut di wilayah maritim, pengawasan dan pengamanan wilayah laut, kapabilitas penangkalan di laut, kemampuan membangun garis pertahanan laut dan proyeksi kekuatan laut.

Kekuatan maritim yang dimiliki oleh sebuah negara dapat menjadi dasar untuk menjalankan strategi maritim yang meliputi memperoleh atau memanfaatkan pengendalian laut, penguasaan atau pertahanan laut dan/atau proyeksi kekuatan di wilayah laut (Chairil et al., 2022). Dimana strategi tersebut sebagian besar menunjukan tingkat dominasi terhadap kekuatan lawan. Bagi Indonesia dimana angkatan laut akan memiliki kendali jika memiliki kekuatan laut dan penguasaan strategi perang laut melebihi lawan. Kendali atas wilayah laut kuat maka musuh tidak dapat melakukan serangan dari wilayah laut secara langsung sedangkan dalam rangka membangun kekuatan pertahanan untuk mencegah musuh kemampuan musuh menggunakan wilayah laut. Dengan demikian kebijakan yang kemudian ditempuh oleh pemerintahan Presiden Prabowo dalam upaya peningkatan kekuatan maritim akan ditekankan pada penguasaan wilayah laut dan penangkalan terhadap berbagai ancaman tradisional maupun non-tradisional di wilayah laut.

Sementara Till dan Bratton (Till & Bratton, 2012) memberikan gambaran mengenai klasifikasi dari proyeksi kekuatan angkatan laut berdasarkan kemampuan atau cakupan area operasinya yakni *blue-water navy, green-water navy* dan *brown-water navy*. *Blue-water navy* merupakan kemampuan angkatan laut

Global Political Studies Journal
Volume 10 Nomor 1 Edisi April 2026
P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905
DOI 10.34010/gpsjournal.v10i1

untuk beroperasi di laut dalam atau jauh diluar wilayah lautnya. *Green-water navy* merupakan kemampuan angkatan laut untuk beroperasi di wilayah laut sekitar kawasan. Sementara *brown-water navy* merupakan kemampuan angkatan laut yang hanya dapat beroperasi di sekitar wilayah pantai. Dimana kategorisasi kemampuan tersebut akan ditentukan oleh tingkat persenjataan yang dimiliki serta doktrin yang dimiliki oleh angkatan laut sebuah negara. Kategorisasi tersebut akan menjadi landasan bagi arah pembangunan kekuatan maritim yang dilakukan oleh Indonesia oleh Presiden Prabowo saat ini melalui akuisisi berbagai ALUTSISTA akan memiliki kontribusi terhadap kemampuan/ jangkauan operasional TNI AL sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Kemampuan dari angkatan laut merujuk pada Booth (Booth, 2014) akan berfungsi dalam 3 konsep peran (trinitas) yang dijalankan yakni peran militer, peran penindakan/*policing* dan peran diplomasi. Peran diplomasi yang dijalankan seringkali dikenal dengan diplomasi maritim, merujuk pada Le Miere (Miere, 2014) terdapat 3 jenis diplomasi maritim yakni diplomasi maritim kooperatif, diplomasi maritim persuasif dan diplomasi maritim koersif. Diplomasi maritim kooperatif dilakukan sebagai upaya untuk membangun jejaring kerjasama dan kolaborasi yang pada tujuannya untuk meningkatkan hubungan diplomatik, memperkuat aliansi serta membangun rasa saling percaya. Diplomasi persuasif merujuk pada upaya untuk membangun citra dan pengakuan terhadap kekuatan maritim pada tingkat internasional. Sementara diplomasi maritim koersif dimaksudkan untuk mencapai tujuan politik melalui upaya secara terbuka menunjukan postur kekuatan dalam rangka menangkal potensi ancaman baik dari aktor negara maupun non-negara. Diplomasi maritim Le Miere ini akan menjadi dasar untuk melihat penggunaan kekuatan maritim yang dibangun oleh Presiden Prabowo melalui modernisasi TNI AL dalam politik luar negeri serta diplomasi Indonesia.

3. Metode Penelitian

Artikel ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan sebagai upaya dari penulis untuk menguraikan arah dan kebijakan pembangunan kekuatan maritim Indonesia di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai fenomena penelitian dengan karakteristik kompleks karena sifatnya yang multidisiplin, paradox dan dilematis (Creswell, 2014). Tulisan ini berusaha untuk membangun deskripsi mengenai arah pembangunan kekuatan maritim Indonesia dan mengkaitkan terhadap diplomasi serta tantangan yang harus dihadapi dalam Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Prabowo dalam proses tersebut dengan menggunakan tipe deskriptif analisis (Sugiyono, 2018). Dengan tipe deskriptif analisis tulisan ini akan menghasilkan sebuah elaborasi terhadap landasan teori untuk menjawab rumusan masalah yang digunakan terkait kebijakan pembangunan kekuatan maritim, signifikansi terhadap postur diplomasi serta tantangan yang harus dihadapi.

Argumen utama yang diuraikan dalam pembahasan pada tulisan ini didukung dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi litelatur. Studi litelatur yang dilakukan oleh penulis meliputi berbagai buku, artikel jurnal, laporan resmi, majalah maupun pemberitaan dari media massa mengenai kekuatan maritim Indonesia serta signifikansi terhadap diplomasi yang dijalankan oleh Indonesia. Dimana dengan

Global Political Studies Journal
Volume 10 Nomor 1 Edisi April 2026
P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905
DOI 10.34010/gpsjournal.v10i1

merujuk pada Creswell (Creswell, 2014) berbagai literatur sebagai data berupa teks, gambar, grafik dan lain sebagainya dimaknai oleh penulis untuk kemudian digunakan menganalisis berdasarkan landasan teoritis mengenai kekuatan maritim serta keterkaitannya dengan diplomasi maupun politik luar negeri Indonesia. Data yang digunakan dalam tulisan ini telah dilakukan triangulasi dengan memeriksa data dari dokumen resmi pemerintah Indonesia, berbagai artikel jurnal serta pemberitaan dari media massa (Boije, 2014). Hal ini dilakukan untuk memperoleh data valid sebagai dasar analisis untuk menguraikan argumen utama dari tulisan ini.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Proyeksi Arah Pembangunan Kekuatan Angkatan Laut Indonesia sebagai Tulang Punggung Maritim Indonesia di Era Prabowo Subianto.

Booth (Booth, 2014) menempatkan lautan sebagai media bagi jalur pergerakan barang dan orang, memproyeksikan kekuatan untuk mendukung diplomasi dan kepentingan militer serta pemanfaatan sumber daya alam. Maka dalam rangka menjamin pengelolaan terhadap wilayah laut diperlukan pembangunan angkatan laut yang akan menjalankan fungsi militer, penegakan hukum dan diplomasi. Sejalan dengan penjelasan diatas Indonesia yang secara geografis merupakan negara kepulauan dimana sebagian besar wilayahnya merupakan laut menjadikan perbatasan negara negara lain didominasi pada wilayah laut serta memiliki potensi ekonomi dari pemanfaatan sumber daya laut yang sangat tinggi. Dengan demikian bagi Indonesia Angkatan Laut menjadi tulang punggung dan memiliki peran strategis dalam menjaga kepentingan serta kedaulatan wilayah di laut dari berbagai potensi ancaman (Syarifuddin, 2017). Oleh karena tugas dan peran tersebut maka diperlukan upaya berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kemampuan melalui modernisasi Alutsista, Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan kerjasama dengan negara lain serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi (Dewi, 2023).

Doktrin pertahanan Indonesia yang berorientasi pada pilihan defensif, memposisikan Indonesia harus mampu mempertahankan kedaulatan dari potensi invasi kekuatan asing. Demikian pun pada aspek pertahanan maritim yang defensif, Indonesia akan menerapkan pengamatan dan penangkalan terhadap ancaman yang datang. Dimana strategi perang maritim bukan hanya dipahami sebagai perang laut yang bertujuan untuk menghancurkan armada musuh, namun lebih kepada mencegah agar armada musuh untuk masuk kedalam wilayah laut territorial dan melindungi kapal-kapal yang melakukan patroli laut (Fajri, 2020). Berkaca pada doktrin ini, pembangunan kekuatan Angkatan Laut Indonesia lebih diarahkan pada membangun *green-water navy.* Dimana operasional dari kekuatan angkatan laut akan difokuskan dalam rangka menjaga wilayah laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) serta menjamin keamanan jalur pelayaran internasional yang melewati wilayah laut Indonesia.

Pembangunan armada angkatan laut pada *green-water navy* akan didominasi oleh kapal fregat, kapal cepat, kapal anti-ranjau serta didukung oleh berbagai jenis kapal patroli (Lindberg & Todd, 2002). Kekuatan armada TNI AL yang berfokus pada pembangunan *green-waters navy* dapat dilihat dari komposisi jenis kapal yang menjadi tulang punggung seperti yang ada pada tabel berikut:

Global Political Studies Journal
Volume 10 Nomor 1 Edisi April 2026
P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905
DOI 10.34010/gpsjournal.v10i1

Postur Armada TNI AL Tahun 2025

Jenis Kapal	Jumlah
Fregat	7
Corvette	25
Kapal Cepat Rudal & Patroli	168
Kapal Penyapu Ranjau	9
Kapal Pendarat Amphibi	32
Kapal Pendukung & Logistik	15
Kapal Selam	4

Sumber: (Diolah peneliti dari berbagai sumber)

Komitmen dalam peningkatan kekuatan eksisting tersebut menjadi bentuk dari komitmen pemerintah Indonesia khususnya Kementrian Pertahanan dalam merespon potensi ancaman maritim (Setiawati et al., 2025). Pada tahun 2021 saat Prabowo Subianto menjadi menteri pertahanan upaya pemenuhan kebutuhan atas kapal Fregat, Indonesia menandatangani kesepakatan dengan Fincantieri dari Italia untuk pembelian 6 unit fregat FREMM bagi TNI AL. Disamping pada tahun 2019-2024 untuk mengakselerasi industri pertahanan dalam negeri, program pemenuhan kebutuan kapal fregat difokuskan pada produksi dalam negeri dengan program Fregat Merah-Putih (FMP) antara Kementrian Pertahanan dengan PT PAL (Marzuki et al., 2025). Desain FMP yang saat ini tengah dikembangkan oleh Indonesia didasarkan pada fregat kelas Iver Huitfledt yang dioperasikan oleh Angkatan Laut Denmark.

Setelah terpilih menjadi Presiden Indonesia untuk periode 2024-2029 Prabowo Subianto yang pada masa pemerintahan sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan, aktif dalam melakukan pengadaan berbagai Alutsista untuk TNI, tidak terkecuali bagi TNI AL. Bersamaan dengan pembelian pesawat tempur Rafale untuk TNI AU, Indonesia melakukan pemesanan terhadap kapal selam Scorpene dari Perancis. Tidak sampai disana langkah besar yang cukup signifikan dalam pengadaan Alutsista bagi TNI AL ditunjukan dengan akuisisi terhadap Kapal Induk ITS Giuseppe Garibaldi bekas angkatan Laut Italia. Meskipun berstatus hibah, namun opsi untuk menerima hibah tersebut banyak menuai pertanyaan mengenai signifikansi dari kapal Induk ini bagi TNI AL, khususnya terkait dengan tujuan operasional dalam strategi dan arah pembangunan TNI AL. Secara, teoritis kapal induk menjadi salah satu instrument untuk mendukung kapabilitas ofensif sebuah negara di laut dan syarat bagi pembangunan kemampuan *blue-water navy*.

ITS Giuseppe Garibaldi yang sebelumnya digunakan oleh AL Italia merupakan kapal induk ringan yang dioperasikan untuk mengangkut pesawat tempur dengan spesifikasi *Vertical/Short Take Off and Landing* (VTOL) yakni AV-8B Harrier II dan berbagai helikopter. Dimana sejatinya berfungsi untuk meningkatkan proyeksi kekuatan untuk dapat mendukung misi tempur jarak jauh sebagai langkah awal pembangunan angkatan laut untuk menuju *blue-water navy.* Meskipun demikian, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya pembangunan TNI AL diarahkan pada *green-water navy* dengan strategi defensif. Artinya Indonesia akan mengoperasikan kapal induk tanpa doktrin operasi kapal induk tradisional yang merujuk pada kemampuan ofensif dengan berbagai pesawat tempur yang dibawa serta rombongan kapal pengiringnya (Xian & Kristanto, 2026). Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan *green-water navy* bagi TNI AL, kedatangan ITS Giuseppe Garibaldi akan menjadi sebuah langkah besar dan

Global Political Studies Journal
Volume 10 Nomor 1 Edisi April 2026
P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905
DOI 10.34010/gpsjournal.v10i1

sangat menarik bagi Indonesia sebagai negara kepulauan besar (Lewis, 2026).

Akuisisi terhadap ITS Giuseppe Garibaldi bagi TNI AL dapat berkaca pada pengalaman negara Asia Tenggara lain yang juga mengoperasikan kapal induk dengan kelas serupa yakni Thailand dengan HTMS Chakri Naurebet. Dimana jika berkaca pada Thailand serta pernyataan dari pejabat di lingkungan TNI AL kapal induk yang akan menjadi bagian dari TNI AL akan lebih dominan digunakan sebagai *flagship* dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). ITS Giuseppe Garibaldi akan menjadi tulang punggung TNI AL dalam operasi *Humanitarian Asistance and Disaster Relief* (HADR) dibandingkan sebagai instrumen proyeksi kekuatan dalam pengertian tradisional (*hard power*). Dengan demikian, jika ITS Giuseppe Garibaldi difungsikan sebagai kapal non-combat khususnya dalam fungsi HADR, maka akan meningkatkan kemampuan TNI AL dalam melaksanakan fungsi distribusi bantuan, misi pencarian dan penyelamatan, penyediaan fasilitas medis, relokasi pengungsi, mobilisasi relawan dan pengamanan lokasi bencana (Witjaksono, 2019).

Kemungkinan ini sangat terbuka terlebih jika merujuk pada ketersediaan pesawat tempur sebagai instrumen ofensif yang akan mengisi kapal induk kelas tersebut sangatlah terbatas, pilihan hanya tersedia AV-8B Harier yang sudah dipensiunkan oleh banyak negara sementara opsi lain adalah F-35 Lightning dengan kemampuan serupa namun dengan teknologi lebih canggih tidak ada dalam opsi pengadaan Indonesia. Dengan demikian maka kemungkinan terbesar TNI AL menjadikan ITS Giuseppe Garibaldi sebagai platform *helicopter carrier,* dan dimasa yang akan datang akan difungsikan untuk pangkalan pesawat tanpa awak (*drone*) (Lim, 2026). Dimana bagi Indonesia sebagai negara kepulauan ketersediaan infrastruktur yang belum merata menjadi pertimbangan utama dimana kapal induk ini akan dapat dioperasikan secara berpindah-pindah dalam waktu cepat di wilayah perairan Indonesia.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan arah pembangunan kekuatan maritim yang dilakukan Indonesia melalui modernisasi dan akuisisi berbagai persenjataan bagi TNI AL diarahkan pada pembangunan dan penguatan *green-water navy.* Upaya Indonesia untuk melakukan akuisisi terhadap kapal fregat, kapal selam hingga kapal induk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan kekuatan maritim dalam strategi pengamanan wilayah perairannya ditengah mengemukanya berbagai potensi ancaman baik ancaman tradisional maupun non tradsional. Disisi lain pembangunan kekuatan maritim yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini tentu tidak hanya memiliki kontribusi terhadap strategi pertahanan maritim, namun juga akan memiliki signifikansi terhadap politik luar negeri Indonesia.

4.2 Pembangunan Kekuatan Maritim: Signifikansi Terhadap Diplomasi Indonesia

Indonesia memiliki wilayah perbatasan yang didominasi oleh perbatasan laut, tidak dapat menghindarkan berbagai permasalahan perbatasan laut dengan negara lain serta ancaman yang berasal dari wilayah laut. Sengketa di wilayah Blok Ambalat dengan Malaysia yang masih dalam status quo, potensi ancaman di Laut Natuna Utara, serta berbagai ancaman non-tradisional terhadap wilayah laut Indonesia seperti *illegal fishing*, penyelundupan, perompakan dan lain sebagainya. Disisi lain pada aspek legal

Global Political Studies Journal
Volume 10 Nomor 1 Edisi April 2026
P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905
DOI 10.34010/gpsjournal.v10i1

sebagai negara kepulauan yang telah meratifikasi *United Nations Convention Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, Indonesia harus memberikan jalur terbuka di wilayah laut teritorialnya untuk jalur pelayaran internasional yang dikenal dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan memberikan jaminan keamanan didalamnya. ALKI sendiri terdiri dari 4 jalur yang menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, oleh karena itu wilayah perairan Indonesia memiliki nilai politik dan keamanan yang sangat strategis bagi negara lain (Pratiwi, 2016). Permasalahan-permasalahan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia melalui pendekatan diplomatik maupun koersif. Oleh karena itu kekuatan maritim yang dibangun oleh Indonesia pada era pemerintahan Presiden Prabowo tidak hanya memiliki signifikansi terhadap aspek pertahanan namun juga akan sejalan dengan kontribusi terhadap postur diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri.

Booth mengemukakan mengenai trinitas dari fungsi angkatan laut, dimana salah satunya adalah fungsi diplomasi. Peran angkatan laut dalam diplomasi difokuskan pada pengelolaan kebijakan luar negeri yang terkait dengan penggunaan kekuatan bersenjata (Booth, 2014). Secara spesifik dalam aplikasinya adalah mendukung kebijakan luar negeri untuk memperkuat posisi tawar dengan negara lain. Lebih jauh Cable (Cable, 2016) memberikan penjelasan bahwa dengan fleksibilitas, kecepatan sebagaimana kapal perang dapat menjadi tontonan yang menarik membuat angkatan laut menjadi instrumen ideal bagi kebijakan luar negeri, memproyeksikan kehadiran negara dan secara tidak langsung menjadi "*floating ambassador*" bagi negara. Pada konteksi Indonesia TNI AL sendiri memiliki posisi yang sangat unik karena menjadi matra yang diberikan kewenangan untuk mendukung politik luar negeri Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 34 Tahun 2024 tentang TNI. Berdasarkan UU tersebut, menjadi dasar TNI AL menjadi instrumen dalam menjalankan diplomasi bagi pemerintah Indonesia.

Disamping itu TNI AL dalam pelaksanaan diplomasi, akan mencerminkan politik luar negeri bebas aktif yang menjadi acuan interaksi Indonesia dengan negara lain salah satu yang kemudian menjadi fokus adalah mengelola stabilitas kawasan. Pelaksanaan diplomasi untuk mengelola stabilitas kawasan yang dijalankan oleh TNI AL terbagi menjadi dua yakni melalui diplomasi kooperatif dan diplomasi koersif (Parasasti et al., 2023). Pada diplomasi kooperatif dititik beratkan pada upaya untuk mengelola kesiapan operasi, serta tindakan pencegahan serta upaya membangun kerjasama dengan angkatan laut negara lain. Sementara diplomasi koersif dilakukan dalam rangka melakukan penindakan dan *deterrence* terhadap ancaman yang berpotensi membahayakan di/terhadap wilayah kedaulatan Indonesia.

Diplomasi kooperatif yang bertujuan untuk membangunan rasa saling percaya dan hubungan baik antar masyarakat harus menjadi modal utama dalam menghadapi berbagai gejolak dikawasan. Hal ini merujuk pada fakta bahwa perubahan geopolitik yang sangat dinamis di Asia Tenggara serta Indo-pasifik akan berdampak pada stabilitas kawasan mengharuskan adanya penguatan kerjasama antara TNI AL dengan mitra dari berbagai negara. Penguatan ini dilakukan melalui keikutsertaan maupun menjadi tuan rumah berbagai latihan AL baik untuk menghadapi ancaman yang bersifat tradisional maupun non-tradisional. Terkait

Global Political Studies Journal
Volume 10 Nomor 1 Edisi April 2026
P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905
DOI 10.34010/gpsjournal.v10i1

dengan arah pembangunan TNI AL sebagai *green-water navy* yang defensif, maka Indonesia memiliki peluang dalam mendorong proyeksi kekuatan berupa "*soft power*" melalui operasi HADR di negara lain.

Sementara terkait dengan berbagai ancaman yang mengemuka di wilayah perairan Indonesia seperti IUU Fishing, penyelundupan maupun perompakan menjadi perhatian yang perlu untuk dilakukan penindakan. Pada aspek ini diplomasi koersif perlu untuk dikedepankan dengan penggunaan kekuatan untuk menetralisir ancaman baik secara unilateral maupun melalui kerjasama dengan negara lain yang berbatasan laut. Sementara disisi lain, sebagaimana Le Miere (Miere, 2014) pembangunan kekuatan maritim yang dilakukan Indonesia melalui TNI AL saat ini akan ditujukan sebagai upaya *deterrence* terhadap berbagai potensi ancaman yang muncul sebagai akibat dari rivalitas negara besar didalam kawasan. Dengan peningkatan kapabilitas angkatan laut Indonesia akan memberikan efek deterrence contohnya terhadap keberadaan aliansi Australia, United Kingdom and United States (AUKUS) yang menjadi salah satu tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia khususnya terkait rivalitas antara China dan anggota AUKUS (Prakoso, 2023) maupun dalam menyikapi dinamika yang terjadi di Natuna Utara (Samy, 2023).

Urgensi TNI AL dalam postur diplomasi Indonesia mengharuskan adanya pembangunan dan penguatan terhadap kapabilitas TNI AL dalam merespon berbagai tantangan dikawasan maupun global untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas (Kembara, 2024). Melalui pembangunan kekuatan maritim yang saat ini tengah diupayakan oleh Presiden Prabowo, dimasa yang akan datang akan memperkuat kapabilitas dari TNI AL untuk berkontribusi dalam pelaksanaan diplomasi pada dua aspek (Prastawan, 2023). *Pertama*, untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia pada level kawasan dan internasional, dimana kehadiran berbagai Alutsista yang akan dihadirkan oleh Presiden Prabowo meningkatkan kemampuan pengawasan terhadap seluruh wilayah laut Indonesia termasuk wilayah terluar yang berbatasan dengan negara lain serta efek deterrence terhadap potensi ancaman baik tradisional maupun non-tradisional serta membawa proyeksi kekuatan melalui *soft power* pada berbagai misi kemanusiaan Indonesia yang lebih luas. *Kedua*, Indonesia berusaha untuk kembali mengukuhkan diri sebagai negara maritim yang mampu untuk mengelola dan mengamankan wilayah lautnya sebagai dasar dari pelaksanaan diplomasi yang dijalankan.

4.3 Tantangan bagi Pembangunan Kekuatan Maritim Indonesia

Pembangunan kekuatan maritim yang dilakukan melalui penguatan terhadap armada TNI AL sejatinya telah menjadi perhatian sejak era Presiden Jokowi melalui PMD. Saat ini melalui visi kebijakan *Optimum Essential Forces* (OEF) dalam pemenuhan Alat Utama Sistem Persenjataan (ALUTSISTA) pemerintahan Presiden Prabowo berusaha untuk meneruskan program yang telah disusun saat menjabat sebagai menteri pertahanan di masa pemerintahan sebelumnya. Dimana dengan wilayah laut yang sangat luas meliputi wilayah laut teritorial maupun ZEE tentu menuntut kehadiran dari armada TNI AL. Oleh karena itu diperlukan penambahan terhadap armada TNI AL yang menurut Wirasuta (Wirasuta, 2013) diperlukan 15 kapal fregat untuk berpatroli di ZEE dan 60 kapal patroli lepas pantai untuk berpatroli di perairan wilayah dan

Global Political Studies Journal
Volume 10 Nomor 1 Edisi April 2026
P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905
DOI 10.34010/gpsjournal.v10i1

kepulauan. Kebutuhan tersebut juga diperlukan untuk mengukuhkan diri sebagai *green-water navy* yang saat ini tengah diupayakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo melalui pengadaan berbagai kapal perang, kapal selam hingga kapal induk.

Pengadaan berbagai Alutsista yang akan mendukung TNI AL dalam rangka penguatan kekuatan maritim Indonesia tentu akan mengalami berbagai tantangan baik pada aspek politik, aspek ekonomi maupun aspek teknis di level domestik maupun di level internasional. Pada aspek politik domestik, kebijakan terkait dengan pembangunan kekuatan maritim ini dirasakan tidak akan mendapatkan banyak mendapatkan tantangan. Kondisi ini terkait dengan pola koalisi yang dibangun di parlemen/ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang hanya menyisakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai oposisi. Artinya dalam rangka melakukan eksekusi terhadap kebijakan pengadaan Alutsista tidak akan mendapatkan rintangan yang berarti. Meskipun demikian, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pengadaan Alutsista secara umum harus melalui proses politik yakni persetujuan dari para politisi yang berada di DPR, yang seringkali memunculkan masalah.

Permasalahan yang masih mengemuka adalah masih adanya pengadaan Alutsista yang tidak sesuai dengan perencanaan sehingga tidak tepat sasaran dan kebutuhan dilapangan karena tidak merujuk pada kebijakan yang telah dibuat (Dzikri, 2016). Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari mekanisme yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia dalam proses pengadaan Alutsista. Pengadaan kebutuhan Alutsista di Indonesia dilakukan melalui sistem desentralisasi, dimana masing-masing matra mengajukan kebutuhan kepada Markas Besar TNI (MABES TNI) selanjutnya dibawa oleh Kementrian Pertahanan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) untuk memperoleh persetujuan terkait besaran anggaran yang diperlukan. Dengan mekanisme ini masing-masing matra tentu akan mengetahui secara teknis apa yang diperlukan bagi kebutuhan mereka. Namun seringkali dalam proses tersebut harus dihadapkan pada berbagai aspek non-teknis (politis) yang berujung pada penyesuaian baik dari sisi alokasi penggunaan anggaran maupun spesifikasi dari kebutuhan Alutsista yang diajukan.

Tantangan yang kemudian harus dihadapi pada aspek internasional yang kemudian perlu untuk diberikan perhatian adalah upaya untuk menghindarkan terjadinya persepsi negatif dari negara lain terkait dengan upaya penguatan kekuatan maritim Indonesia yang akan memicu perlombaan senjata. Kondisi ini terkait dengan dua hal yakni masih belum tuntasnya permasalahan wilayah perbatasan laut antara Indonesia dengan negara tetangga serta persepsi mengenai fungsi ofensif dari Alutsista yang akan didatangkan sebagai contoh kapal induk Giuseppe Garibaldi dan kapal selam scorpene yang akan memperkuat TNI AL. Disamping itu Indonesia dalam hal ini perlu menyadari bahwa sebagai negara non-blok dalam penguatan kekuatan militer melalui pengadaan ALUTSISTA sangat rentan terhadap pandangan dari negara lain yang tergabung dalam aliansi melihat bahwa Indonesia akan mengemuka sebagai ancaman (Karsono et al., 2025). Oleh karena itu diperlukan upaya untuk menyelaraskan kepentingan pembangunan kekuatan maritim dengan pembangunan kepercayaan dari negara-negara lain baik di level kawasan maupun di luar kawasan.

Kebijakan dalam pembangunan kekuatan maritim saat ini Indonesia masih

Global Political Studies Journal
Volume 10 Nomor 1 Edisi April 2026
P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905
DOI 10.34010/gpsjournal.v10i1

rentan mendapatkan tekanan politik dari negara-negara pemasok, khususnya negara barat dalam bentuk embargo persenjataan (Saputra et al., 2022), seperti yang pernah dialami pada tahun 1990an. Kebijakan embargo tersebut jika pada Indonesia diterapkan maka akan membatasi pemenuhan kebutuhan pertahanan yang diperlukan dalam pembangunan kekuatan maritim yang dilakukan. Kondisi ini merujuk pada kenyataan bahwa Indonesia masih bergantung pada pengadaan yang berasal dari negara lain, meskipun Indonesia melalui PT PAL telah memulai proses produksi mandiri namun masih dalam skala terbatas. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri akan menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam menjamin ketersediaan pemasok untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kekuatan maritim yang saat ini tengah diupayakan.

Dengan demikian untuk menghadapi tantangan tersebut maka diperlukan upaya membangun kepercayaan, menyusun kebijakan kolektif serta komunikasi militer terbuka yang dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme di ASEAN seperti *ASEAN Defence Ministerial Meeting* (ADMM) dan ADMM-Plus maupun melalui berbagai kerjasama yang melibatkan TNI AL dengan negara mitra. Hal ini tentu akan menjadi sarana dan membawa pesan diplomatik yang sangat kuat bahwa dengan pembangunan kekuatan maritim yang dilakukan saat ini, Indonesia tetap akan berkomitmen untuk menggunakan pendekatan kooperatif dalam menyikapi berbagai permasalahan yang mengemuka serta menempatkan kekuatan maritim yang dimiliki untuk menjamin stabilitas dan keamanan kawasan (Syhaila & Marzaman, 2025). Artinya dengan kekuatan maritim yang saat ini dibangun, Indonesia tidak akan menjadi kekuatan ofensif serta tetap berkomitmen terhadap stabilitas serta keamanan di kawasan maupun pada level internasional.

Pembangunan kekuatan maritim yang dilakukan oleh Indonesia saat ini lebih dominan dilakukan melalui pembelian berbagai Alutsista yang berasal dari negara lain. Kondisi ini harus didukung oleh anggaran pertahanan yang memadai karena peningkatan kekuatan pertahanan yang seringkali disertai dengan pembelian Alutsista senantiasa hanya melihat pada besaran biaya kontrak pembelian dan pelatihan bagi personil semata. Disamping itu hal harus diperhatikan adalah biaya untuk melakukan pembaruan/ retrofit terkait dengan Alutsista yang didatangkan, terlebih apabila Alutsista tersebut merupakan bekas pemakaian dari negara lain seperti halnya yang perlu dilakukan terhadap kapal induk Giuseppe Garibaldi dan kapal fregat kelas FREMM ex AL Italia yang akan memperkuat TNI AL. Padahal disisi lain jika melihat pada realitasnya porsi anggaran terbesar akan dialokasi pada tahap operasional dan pemeliharaan dan perawatan (harwat).

Bila merujuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 pemerintah mengalokasikan Rp. 337 Triliun untuk operasional, pemeliharaan dan modernisasi (Rachman, 2026). Meskipun demikian terdapat masalah klasik yakni masalah struktural terkait rasio antara belanja personel dengan modernisasi dan pengadaan Alutsista dimana 51% anggaran dialokasikan untuk belanja pegawai dan dukungan manajemen, sementara hanya 40% untuk modernisasi dan pengadaan alutsista (Ardyanto et al., 2025). Lebih jauh Nurdiansyah (Dickry Rizanny Nurdiansyah, 2025) menyatakan bahwa meskipun anggaran pertahanan Indonesia menunjukkan peningkatan, alokasi untuk TNI AL tetap terbatas dibandingkan luasnya wilayah yang harus

Global Political Studies Journal
Volume 10 Nomor 1 Edisi April 2026
P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905
DOI 10.34010/gpsjournal.v10i1

diamankan. Kondisi ini yang pada akhirnya membuat realisasi MEF pada akhir tahun 2024 untuk TNI AL belum mencapai angka 100%. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri mengingat keterbatasan anggaran pertahanan yang dimiliki oleh Indonesia serta proporsi yang harus diberikan dalam pembangunan kekuatan di matra lain seperti Darat dan Udara.

Disisi teknis, tantangan yang kemudian harus dihadapi adalah interoperatibilitas dari Alutsista yang kemudian dihadirkan. Bagi armada TNI AL yang sudah sangat variatif seluruh platform tersebut harus mampu beroperasi sebagai sebuah kesatuan dan juga perlu digaris bawahi adalah teknologi tersebut mampu untuk diintegrasikan dalam operasi bersama dengan matra lain seperti TNI AD dan TNI AU atau aspek *interoperatibility*. Beranjak pada aspek geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, Gunawan (Gunawa, 2025) mengemukakan prioritas pengembangan interoperabilitas yang paling utama adalah membangun kekuatan pemukul yang dapat dimobilisasi dengan cepat di wilayah maritim. Jika kemudian skenario itu harus dijalankan maka, interoperabilitas antara kekuatan matra udara dan laut menjadi variabel kunci untuk memukul mundur kekuatan musuh.

Seperti yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya bahwa Alutsista yang kemudian akan didatangkan untuk memperkuat TNI AL berasal dari berbagai negara. Nurdiansyah (Nurdiansyah, 2025) memberikan penjelasan mengenai tantangan interoperatibilitas tersebut dalam akuisisi fregat kelas Pattugliatore Polivalente d'Altura (PPA) dari Italia, yang menggunakan CMS Leonardo ATHENA, pada akhirnya akan memberikan tantangan interoperabilitas dalam level armada TNI AL yang sudah sangat beragam. Kondisi ini mengharuskan TNI AL mengintegrasikan platform tersebut dengan fregat yang telah dimiliki yakni kelas SIGMA dan PKR yang menggunakan CMS Thales TACTICOS dari Belanda, sementara disisi lain Fregat Merah Putih berbasis desain Arrowhead 140 dari Inggris. Masalah ini lebih dari sekadar tantangan teknis; ia menciptakan tantangan interoperabilitas manusia. Disisi lain penambahan platform kapal yang akan dioperasikan TNI AL dengan hadirnya kapal induk Giuseppe Garibaldi harus menjadi perhatian mengingat dalam sisi operasionalnya akan menjadi bagian dari armada yang dimiliki. Termasuk kemungkinan perubahan peran yang akan dijalankan oleh kapal induk Giuseppe Garibaldi, kompatibilitas dengan helikopter yang dimiliki oleh TNI AL maupun matra lain atau akan mendatangkan helikopter khusus dan membentuk satuan baru yang akan berpangkalan di kapal induk tersebut masih menjadi tantangan tersendiri yang harus diselesaikan.

Disamping adaptasi dan integrasi yang terkait dengan Alutsista, adaptasi dari personel yang akan mengawaki dan mengoperasikan berbagai Alutsista baru TNI AL tersebut perlu untuk mendapatkan perhatian. Operator yang akan mengawaki berbagai Alutsista baru TNI AL tidak lepas akan berhadapan tantangan dalam pembangunan kekuatan maritim yang sedang diupayakan oleh Presiden Prabowo saat ini. Dihadirkannya berbagai Alutsista modern saat ini tentu menuntut keterampilan serta adaptasi yang cepat dalam penggunaan teknologi terbaru termasuk bagaimana doktrin baru yang harus diadopsi. Tantangan terbesar bagi TNI AL bukan hanya sekadar melatih dan membiasakan personel mengoperasikan joystick atau layar sentuh, namun juga harus menyentuh aspek fundamental dengan melakukan merestrukturisasi terhadap seluruh jalur pendidikan, pengembangan karier, dan prosedur jaga

Global Political Studies Journal
Volume 10 Nomor 1 Edisi April 2026
P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905
DOI 10.34010/gpsjournal.v10i1

untuk menciptakan dan memanfaatkan perwira jenis baru ini secara efektif (Nurdiansyah, 2025). Sejalan dengan Sulung et. al (Priambodo et al., 2024) pengembangan sumber daya manusia (SDM) TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam menghadapi tantangan keamanan maritim di era milenial memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan pembangunan kekuatan maritim Indonesia di era kepemimpinan Presiden Prabowo telah menunjukan perkembangan signifikan melalui upaya mendatangkan dan memproduksi ALUTSISTA untuk memperkuat armada TNI AL. Meskipun memiliki latar belakang militer yang berasal dari TNI AD, namun komitmen yang ditunjukan terhadap pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia juga diberikan kepada angkatan udara serta angkatan laut. Pembangunan kekuatan maritim yang dilakukan terhadap armada TNI AL tidak hanya memiliki signifikansi terhadap aspek militer dalam rangka menegakan kedaulatan wilayah melalui diplomasi maritim koersif namun juga terhadap politik luar negeri bebas aktif serta postur diplomasi khususnya diplomasi maritim kooperatif untuk memperkuat jejaring kerjasama dalam rangka memelihara keamanan dan perdamaian baik pada level kawasan maupun internasional.

Meskipun pada tulisan ini diperlihatkan bahwa dalam proses pembangunan kekuatan maritim yang dilakukan terhadap TNI AL tersebut, Presiden Prabowo harus menghadapi berbagai tantangan baik pada aspek politik, aspek ekonomi maupun aspek teknis yang kemudian harus coba untuk diselesaikan. Upaya dalam rangka meminimalisir tantangan-tantangan tersebut dapat dilakukan dengan menyusun peta jalan dalam rangka pembangunan kekuatan maritim melalui modernisasi TNI AL untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Sehingga proses pembangunan kekuatan maritim dimasa yang akan datang akan terencana dengan baik dari aspek politik, ekonomi maupun teknis serta pada akhirnya pemerintahan yang akan datang setelah era Presiden Prabowo Subianto mendapatkan fondasi dan acuan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Daftar Pustaka

Acuan dari buku:

Boije, H. (2014). *Analysis in Qualitative Research*. Sage.

Booth, K. (2014). Navies and foreign policy. In *Navies and Foreign Policy*. https://doi.org/10.4324/9781315769646

Cable, J. (2016). *Gunboat Diplomacy, 1919-79: Political Applications of Limited Naval Force*. Springer. https://books.google.co.id/books?id=oOxeCwAAQBAJ&dq=Cable,+J.+2016.+Gunboat+Diplomacy:+1919-79+Political+Applications+of+Limited+Naval+Force.+New+York:+Palgrave+Macmillan.&lr=&source=gbs_navlinks_s

Creswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approach*. Sage.

Kearsley, H. J. (1992). Maritime power and the twenty-first century. In *Darmouth : Aldershot)*.

Lindberg, M., & Todd, D. (2002). *Brown-,Green-And Blue-Water Fleets :*

Global Political Studies Journal
Volume 10 Nomor 1 Edisi April 2026
P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905
DOI 10.34010/gpsjournal.v10i1

The Influence of Geography on Naval Warfare, 1986 to the Present. Preager.

Miere, C. Le. (2014). *Maritime Diplomacy in the 21st Century Drivers and Challenge*. Routledge.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.

Till, G., & Bratton, P. (2012). *Sea Power and the Asia-Pacific: The Triumph of Neptune?* Routledge.

Acuan artikel dalam buku:

Gunawan, A. B. (2025). Rekalibrasi Arah Transformasi Pertahanan Indonesia. In *Gagasan Akademisi Maroon untuk Negeri*. Universitas Bakrie Press.

Acuan artikel dalam Jurnal:

Anwar, S. (2016). Membangun Keamanan Maritim Indonesia. *Jurnal Pertahanan*, *6*, 1–22. https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/download/315/190

Ardyanto, F., Thamrin, S., & Laksmono, R. (2025). Strategi Optimalisasi Anggaran Pertahanan di Tengah Keterbatasan APBN Indonesia: Pendekatan Multi-Dimensi Untuk Pencapaian Minimum Essential Force. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, *5*(5), 1391–1397. https://doi.org/10.53866/jimi.v5i5.1026

Bateman, S. (1996). Naval Roles and Maritime Power. *Maritime Studies*, *84*, 13–24. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/07266472.1995.10878431

Bawono, A. (2026). Mordernizing Leadership in the Indonesia Navy. *Research and Analysis: Journal of Applied Research*, *12*(1), 164–167.

Budiman, I., Abdurachman, B., & Nurhaliza, A. (2023). The Role of The National Navy (TNI AL) In Strengthening Maritime Domain Awareness in Indonesia. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, *13*(1), 43–54.

Chairil, T., Wicaksono, G. A., & Nurbaitty, M. A. (2022). Establishing Maritime Power Competitiveness Index: Benchmarking Indonesia Navy`s Aspiration to Became World Class Sea Power. *Intermestic: Journal of International Studies*, *7*(1), 343–364.

Dewi, I. M. (2023). Potensi Maritim Indonesia dan Peran Angkatan Laut dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa. *Jurnal Maritim Indonesia*, *11*(2), 144–153. https://doi.org/10.52307/jmi.v11i2.136

Dzikri, I. (2016). Negara dan Kapasitas Adopsi Inovasi: Studi Kasus Tranformasi Pertahanan Indonesia Periode 1998-2014. *Global: Jurnal Politik Internasional*, *18*(2), 131. https://doi.org/10.7454/global.v18i2.305

Efriza. (2018). Refleksi: Pembangunan Maritim Sebagai Haluan Negara di Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo. *Jurnal Majelis: Medua Aspirasi Konstitusi*, *10*, 39–52.

Fajri, M. B. (2020). Strategi Pertahanan Maritim Indonesia di Tengah Dinamika Perang Hibrida Kawasan Laut China Selatan. *Jurnal Penelitian Politik*, *17*(1), 59–78. https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v17i1.846

Hermawan, T., & Sutanto, R. (2022). Strategi Pertahanan Laut Indonesia dalam Analisa Ancaman dan Kekuatan Laut. *Jurnal Education and Development*, *10*(2), 363–371.

Global Political Studies Journal
Volume 10 Nomor 1 Edisi April 2026
P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905
DOI 10.34010/gpsjournal.v10i1

https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3751/2421

Karsono, E., Tumanggor, M., & Suwito. (2025). Analysis of Strategic Environmental Trends Towards the Achievement of Optimum Essential Force Fulfillment (2024–2045). *International Journal of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, *5*(1), 322–328. https://doi.org/https://doi.org/10.55227/ijhess.v5i1.1789

Kusuma, A. W., & Faisal, M. (2022). Strategi Pertahanan Laut Indonesia Dihadapkan Dengan Perkembangan Lingkungan Maritim Global dan Regional. *Journal Education and Development*, *10*(2), 332–339.

Nurdiansyah, D.R. (2025a) "Benteng Nusantara: Postur Peperangan Litoral TNI Angkatan Laut", *dalam Jurnal Maritim Indonesia*, Vol.13 No.2, pp. 23–40.

Nurdiansyah, D. R. (2025b). Transformasi Pendidikan Personel TNI AL: Menjawab Tuntutan Peperangan Modern dari Akuisisi Fregat PPA dan Kemampuan Drone Nirawak. *Cakrawala: Media Informasi TNI AL Kemaritiman*, 4–9.

Parasasti, M. A., Warka, I. W., & Adriyanto, A. (2023). The Urgency of the Diplomatic Role of the Indonesian Navy in Supporting Security Stability in the Indo-Pacific Region. *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, *2*(1), 321–328. https://doi.org/10.57235/aurelia.v2i1.301

Prakoso, L. Y. (2023). Policy Implementation Indonesia Naval Diplomacy in Facing the AUKUS Challenge to Realize Stability in the Indo-Pacific Region. *Educational Administration: Theory and Practice*, *29*(4), 3960–3970.

Prastawan, H. (2023). Optimizing the Role of Indonesian Navy Diplomacy in Supporting the Policy Pillars of Maritime Diplomacy. *International Journal of Social and Management Studies*, *4*(4), 65–72.

Priambodo, S., Fartianto, G., & Yuana, S. T. (2024). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia TNI AL dalam Menghadapi Tantangan Keamanan Maritim di Era Milenial. *Judge : Jurnal Hukum*, *5*(02), 245–253. https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.587

Samy, M. (2023). Soldiers and Diplomats: Indonesian Naval Diplomacy in the South China Sea. *Indonesian Journal of International Relations*, *7*(1), 119–139. https://doi.org/10.32787/ijir.v7i1.446

Saputra, O. I., Darmawan, W. B., & Dermawan, W. (2022). Kebijakan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dalam Memperkuat Alat Utama Sistem Pertahanan Udara. *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, *1*(1), 49. https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i1.38866

Setiawati, D., Soemantri, A. I., Legowo, E., Prakoso, L. Y., & Risahdi, M. (2025). Modernization of Indonesian Naval Fleet to Realize Asta Cita. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, *6*(11), 3453–3459. https://doi.org/10.59141/jiss.v6i11.2082

Supandi, A. (2015). Pembangunan Kekuatan TNI AL dalam Rangka Mendukung Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Pertahanan*, *5*(1), 1–24.

Global Political Studies Journal
Volume 10 Nomor 1 Edisi April 2026
P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905
DOI 10.34010/gpsjournal.v10i1

Syarifuddin, D. (2017). Tantangan dan Strategi Indonesia dalam Membangun Kekuatan Maritim. *Jurnal Pertahanan*, *4*(1), 1–13.

Syhaila, A. N., & Marzaman, A. P. (2025). Peran Diplomasi Pertahanan dalam Meningkatkan Stabilitas Regional di Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, *10*(6), 111–120.

Teo, C. H. (1991). Maritime Power in South East Asia. *Journal of the Australian Naval Institute*, 13–27.

Wirasuta, D. S. (2013). Perencanaan Pembangunan Kekuatan Maritim Indonesia untuk Menghadapi Tantangan Tahun 2020. *Jurnal Pertahanan*, *3*(1), 25–37.

Acuan dari Prosiding:

Witjaksono, E. T. (2019). Maritime Disasters and HADRS: Indonesia Navy`s Commitments in Responding to Natural and Man-Made Disasters in the Last Decade. *Galle Dialogue International Maritime Conference*, 83–93.

Acuan dari tugas akhir, laporan penelitian, skripsi, tesis dan desertasi :

Kembara, G. (2024). *Scaling up the Ladder: Expanding Indonesia`s Naval Defence Diplomacy* (106; IDSS Paper).

Lim, N. (2026). *Indonesia`s Aircraft Carrier Acquisition: A Planned Force Transformation?* (034; IDSS Paper).

Marzuki, K., Priamarizki, A., & Kembara, G. (2025). *Indonesia Navy`s Post-Defence Modernization Challenges and Implications*.

Acuan artikel dalam website:

Lewis, T. (2026). *Indonesia Navy Takes the Up-Ramp*. The Australian Naval Institute. https://navalinstitute.com.au/indonesia-navy-takes-the-up-ramp/

Rachman, F. F. (2026). *Anggaran Pertahanan 2026 Naik ke Rp 337 T, Industri Dalam Negeri Jadi Fokus*. Detikcom. https://finance.detik.com/industri/d-8349096/anggaran-pertahanan-2026-naik-ke-rp-337-t-industri-dalam-negeri-jadi-fokus.

Xian, C. de, & Kristanto, J. (2026). *Why Indonesia`s Proposed Aircraft Carrier Aquisition Makes Sense*. The Diplomat.